

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

(Studi di Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu)

Rahmi Marselah^{1*}, Leni Nurul Kariyani²

¹²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: rahmiii3004@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received : 26 Maret 2026 Accepted : 15 April 2026 Published : 30 April 2026	<i>Village community empowerment based on local wisdom is a strategy for improving community welfare in a sustainable manner. Mokong Village, Moyo Hulu District, Sumbawa Regency, possesses diverse local potentials; however, their utilization in empowerment programs has not been evenly optimized. This study aims to analyze the implementation of local wisdom-based community empowerment in improving the welfare of the Mokong Village community during 2024–2025 and to identify the inhibiting factors affecting its implementation. This research employs a qualitative method with a descriptive case study approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results indicate that community empowerment has not been optimally implemented due to various constraints related to both program implementation and the role of facilitators. These constraints include limited facilities and infrastructure, inadequate physical environmental conditions, budget limitations, and difficult accessibility, particularly to Kalimango Hamlet. In addition, limited capital and insufficient institutional facilities hinder the development of BUMDes enterprises and traditional clothing rental businesses. These findings suggest that the success of community empowerment is not solely determined by community participation, but also heavily dependent on structural support, effective program facilitation, and the availability of sustainable supporting resources.</i>
Keywords Community Empowerment; Local Wisdom; Public Welfare.	

PENDAHULUAN

Dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah desa adalah struktur pemerintahan yang terendah. Meskipun demikian, pemerintah desa memainkan peran yang sangat penting sebagai pusat pelayanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Maju atau tidaknya bangsa Indonesia bergantung pada kemajuan desa dan masyarakatnya. Dengan demikian, pemerintah pusat dan provinsi setuju untuk menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menunjukkan betapa pentingnya desa dalam pembangunan negara.

Salah satu tonggak penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah pengesahan UU Desa. UU ini memberikan desa wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan inisiatif, hak asal usul, dan adat istiadat lokal (UU No. 6 Tahun 2014). Menurut Suharto (2010), pemberian otonomi yang luas ini dikombinasikan dengan pembagian sumber daya finansial yang signifikan, yaitu Dana Desa, dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 1 (Tanpa Kemiskinan) dan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Riyanti & Raharjo, 2021).

Salah satu masalah utama yang menjadi subjek penelitian adalah kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu wilayah. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat penting dan perlu dikurangi atau dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Kurangnya pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi akan menyebabkan negara tersebut didominasi oleh negara-negara lain yang lebih maju. Selain itu, kemiskinan memiliki dampak negatif terhadap kehidupan. Kemiskinan seringkali menjadi pemicu terjadinya kejahatan, seperti pencurian, perampokan dan pemerasan diantara sesama masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi masalah yang perlu ditangani, tanpa upaya nyata untuk mengurangnya, bangsa dan negara akan mengalami pergerakan mundur (Prameswari *et al.*, 2021).

Kegiatan pembangunan pada umumnya diawali dari pembangunan dari tingkat yang paling dasar, yakni pembangunan desa. Pembangunan yang dimulai dari bawah ini berperan strategis dalam perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Sebagai hasil dari partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, masyarakat harus dilibatkan dalam pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu cara untuk mencapai pengentasan kemiskinan. Pembangunan desa dimulai dengan cara membardayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakatnya. Pembangunan yang dilakukan dengan memberdayakan ekonomi dinilai efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama menanamkan pondasi ekonomi berbasis masyarakat (Husain, 2020).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sistematis untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan harkat martabat masyarakat agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Ini merupakan upaya menempatkan masyarakat sebagai subjek (motor penggerak) yang berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah mereka sendiri. Upaya ini dilakukan dengan memberikan peluang kepada masyarakat agar mereka dapat mencapai keberdayaan. Daripada hanya berkonsentrasi pada masalah, masyarakat harus mengidentifikasi dan mengorganisasi potensi dan aset mereka. Kearifan, yang mencakup nilai-nilai budaya, praktik sosial-ekologis tradisional, dan pengetahuan yang terbukti dapat menjaga harmonisasi kehidupan dan lingkungan, adalah salah satu aset terbesar yang dimiliki desa di Indonesia (Mustangin *et al.*, 2017).

Dari sisi tujuannya, pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menunjukkan pada hasil yang dicita-citakan dalam sebuah dinamika sosial, yaitu masyarakat berdaya, memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik dari fisik, sosial, ekonomi dan politik. Melalui pemberdayaan, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan, terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan mandiri dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat hendaknya dimulai dengan membentuk pikiran kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik masyarakat yang baik. Kognitif pada dasarnya adalah kemampuan untuk berfikir berdasarkan pengetahuan individu dengan tujuan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Keempat aspek tersebut (konatif, kognitif, psikomotorik, dan afektif) penting demi tercapainya masyarakat yang mandiri (Mardikonto & Soebianto, 2012).

Dalam konteks pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa berbasis potensi lokal telah lama diakui, sebagai salah satu strategi yang efektif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal adalah strategi pembangunan yang menempatkan nilai, tradisi, dan potensi lokal sebagai landasan utama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi. Pendekatan ini berfokus pada

kemandirian, pelestarian budaya, serta pemanfaatan sumber daya setempat (seperti pertanian, kerajinan, dan pariwisata) secara berkelanjutan. Dengan demikian, proses pemberdayaan yang dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi dimana masyarakat itu tinggal tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian masyarakat, tetapi juga dapat memperkuat rasa memiliki komunitas terhadap nilai, tradisi, dan potensi lokal mereka (Endah, 2020).

Pemanfaatan nilai kearifan lokal masyarakat setempat sebagai potensi lokal menjadi bagian penentu pemberdayaan masyarakat. Upaya ini semakin relevan, karena dapat mengintegrasikan kekuatan internal desa dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga menggali dan mengembangkan potensi lokal yang sudah ada agar menjadi lebih bernilai. Strategi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada penguatan komunitas secara keseluruhan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia. Pemberdayaan berbasis potensi lokal ini dilaksanakan untuk memberikan bekal dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat, sehingga mereka diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam pengambilan keputusan, serta mengelola sumber daya dan potensi lokal dengan lebih efektif demi kesejahteraan dan peningkatan kemandirian masyarakat (Pitasari *et al.*, 2023).

Masyarakat desa memiliki ciri-ciri dan potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, otonomi desa merupakan syarat penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan berjalan dengan baik dan efektif. Dana Desa, yang berasal dari APBN, adalah alat strategis untuk pemberdayaan desa karena memberikan dukungan finansial langsung kepada desa untuk dikelola oleh masyarakat, memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi lokal, infrastruktur, ekonomi, dan kualitas hidup. Program dana desa telah dilaksanakan sejak tahun 2015, dengan prioritas penggunaannya untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah implikasi dari strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat (Widianti dan Dzarkasyi, 2024).

Desa Mokong di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa adalah salah satu desa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena kekayaan alam dan sumber daya lokal yang beraneka ragam. Desa Mokong, yang terletak di Kecamatan Moyo Hulu, memiliki luas 52,72 km² dan terdiri dari empat dusun secara administratif: Dusun Pelita, Dusun Mokong, Dusun Sayang, dan Dusun Kalimango. Empat dusun ini berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Desa Mokong di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena kekayaan alam dan sumber daya lokal yang sangat beragam. Dengan luas wilayah 52,72 km² yang terbagi menjadi empat dusun (Dusun Pelita, Dusun Mokong, Dusun Sayang, dan Dusun Kalimango), desa ini telah menjalankan beberapa inisiatif pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Mokong dari 0,7002 (status Berkembang) pada tahun 2022 menjadi 0,7248 (status Maju) pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Namun, kemajuan ini masih dihadapi oleh berbagai tantangan, seperti ketidakmerataan pelaksanaan program antar dusun, kurangnya pasar lokal untuk mendorong pemberdayaan melalui produk lokal, dan berbagai hambatan eksternal lainnya.

Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui penggunaan dana desa menjadi strategi penting untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala-kendala

yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan efektivitas program pemberdayaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dampak positif dan kendala yang dihadapi, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan program pemberdayaan di tingkat desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas program pemberdayaan di tingkat desa dan memperkuat upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2021), penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau kejadian apa adanya tanpa memanipulasi variabel, menggunakan data non-numerik seperti wawancara dan observasi untuk memahami kenyataan sosial secara mendalam. Tujuannya adalah memberikan gambaran utuh dan rinci mengenai karakteristik, kualitas, serta keterkaitan dari suatu kejadian atau keadaan yang diamati.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dilaksanakan di Desa Mokong, faktor-faktor kesuksesan dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang lebih efektif di masa depan.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Adapun subjek penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dan memahami pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Subjek penelitian meliputi Kepala Desa, pengelola BUMDes, Ketua Karang Taruna, Ketua TP PKK, pelaku program pemberdayaan (Maong, penyewaan baju adat, budidaya ikan lele, dan Rumah Pangan B2SA), serta masyarakat penerima manfaat.

Pemilihan sekolah dan subjek penelitian ini sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan yang kuat bahwa masih banyak program pemberdayaan di Desa Mokong yang gagal dilaksanakan karena memaksakan model yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna merumuskan model pemberdayaan dengan pendekatan yang lebih *bottom-up* yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berakar pada nilai-nilai komunitas untuk menjaga martabat budaya dan kelestarian alam masyarakat lokal.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung terhadap aktivitas Pemberdayaan Masyarakat, dan dokumentasi berupa arsip desa, laporan kegiatan, foto program, data

Indeks Desa Membangun (IDM), serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian, peraturan desa, laporan keuangan, serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teori teori pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2003) sebagai kerangka analisis, yang meliputi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Keempat aspek tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di Desa Mokong, termasuk peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha ekonomi lokal, dukungan lingkungan dan infrastruktur, serta peran kelembagaan desa dalam mendukung keberhasilan program. Teori lain yang digunakan menurut Arsiyah *et al.* (2009) dalam penelitiannya. Teori ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi, hambatan internal (individu), hambatan eksternal (kultural) dan pelaksanaan program (fasilitator).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai informan yang berbeda (kepala sekolah, guru, dan siswa). Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memvalidasi temuan penelitian (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Hasil Penelitian

Gambaran Umum

Desa Mokong memiliki jumlah penduduk 2.255 orang dengan 780 kepala keluarga. Desa ini memiliki visi "Mewujudkan Desa Mokong Yang Bersih, Beradap, Dan Berahlak Muliah" dengan berbagai sarana dan prasarana publik. Data Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan peningkatan signifikan: tahun 2022 senilai 0,7002 (status Berkembang), meningkat menjadi 0,7132 (status Maju) pada tahun 2023, dan terus meningkat menjadi 0,7248 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program pemberdayaan yang telah dijalankan.

Potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh Desa Mokong yaitu :

1. Produk Maong (Madu Olat Mokong)

Produk maong (Madu Olat Mokong) merupakan produk olahan tradisional yang berasal dari madu olat (bukit) dimana madunya diambil dari bukit dusun kalimango salah satu wilayah Desa Mokong. Keberadaan produk Maong ini tidak hanya mencerminkan identitas budaya lokal Desa Mokong, tetapi juga sumber daya ekonomi yang bernilai strategi dalam upaya pemberdayaan masyarakat

2. Program B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)

program B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) di Desa Mokong merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan ketahanan pangan berbasis potensi dan kearifan lokal. Pelaksanaan program B2SA ini tidak hanya menekankan pada perubahan pola konsumsi masyarakat agar lebih sehat dan bergizi, tetapi juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif yang bernilai ekonomi. Melalui kegiatan penyuluhan, rumah pangan, serta bimbingan teknis pengolahan bahan pangan, masyarakat desa mokong dibekali pengetahuan dan ketrampilan dalam mengolah pangan lokal. Program ini membuka peluang bagi

masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan pelaku usaha kecil, untuk mengembangkan usaha pangan lokal yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

3. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

BUMDes berperan sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola dan mengembangkan berbagai potensi usaha desa secara profesional dan berkelanjutan. Keberadaan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas usaha simpan pinjam Masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2003) yang menekankan empat pilar utama yaitu a) bina manusia, b) bina usaha, c) bina lingkungan dan d) bina kelembagaan.

1. Bina Manusia

Bina Manusia, adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas. Bina Manusia di Desa Mokong dilaksanakan melalui Program B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) yang dikelola oleh Tim Penggerak PKK Desa Mokong. Program ini terdiri dari dua tahap:

- a. Sosialisasi dan pendampingan penanaman bibit pangan lokal (Juli 2025) dengan anggaran Rp34.000.000, mencakup penanaman sawi, singkong, cabai, dan budidaya ikan lele;
- b. Bimbingan Teknis (Bimtek) pengolahan bahan pangan lokal (November 2025) yang diikuti 25-50 peserta.

Dalam pelaksanaan Bina Manusia melalui Program B2SA di Desa Mokong telah berjalan dengan baik. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan pangan lokal. Kegiatan B2SA dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu sosialisasi dan pendampingan penanaman bibit pangan serta Bimbingan Teknis (Bimtek) pengolahan bahan makanan. Kedua kegiatan tersebut memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada masyarakat, mulai dari teknik budidaya hingga pengolahan bahan pangan lokal menjadi makanan bergizi dan aman. Secara keseluruhan, Program B2SA berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian, kreativitas, dan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan sehat, serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Desa Mokong secara berkelanjutan.

2. Bina Usaha

Bina Usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, Bina Manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan. Bina Usaha diimplementasikan melalui Program Rumah Pangan B2SA dengan hasil panen yang dijual kepada masyarakat dan dipromosikan melalui media sosial, produk Maong (Madu Olat Mokong) berasal dari Dusun Kalimango yang telah diproduksi sejak 2019 dengan dukungan pemerintah desa, pemasaran melalui Facebook dan WhatsApp, usaha penyewaan baju adat Sumbawa oleh Karang Taruna dengan penetapan harga terjangkau, dan BUMDes Sumber Rejeki yang mengelola usaha pupuk dan program penggemukan ternak sapi dengan alokasi Rp85.000.000 tahun 2025. Secara keseluruhan, bina usaha telah memberikan dampak nyata berupa peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kemandirian ekonomi desa.

3. Bina Lingkungan

Dalam hal pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan bina manusia dan bina usaha tetapi dalam hal bina lingkungan termasuk. Bina lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya fokus kepada fisik semata, akan tetapi dalam praktik perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh. Bina lingkungan yang terjadi di Desa Mokong dalam pemberdayaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki upaya dalam bina lingkungan lewat pemanfaatan lahan samping lapangan desa untuk Rumah Pangan B2SA, masyarakat diizinkan memanfaatkan rumput yang tumbuh subur sebagai pakan ternak, program penggemukan ternak sapi melibatkan pembentukan kelompok tani ternak yang menerima dukungan modal dari BUMDes, budidaya ayam kampung sebagai program baru yang mulai dilaksanakan, dan pelestarian budaya lokal melalui usaha penyewaan baju adat yang mencerminkan nilai budaya lokal yang masih kuat dalam masyarakat. Bina lingkungan menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

4. Bina Kelembagaan

Kelembagaan menjadi hal yang berpengaruh terhadap berjalannya semua kegiatan yang berkaitan pada manusia, usaha, dan lingkungan. Kelembagaan yang efektif akan menjadi penentu keberhasilan dari tujuan awal pembentukan lembaga. Artinya bina kelembagaan sebagai sebuah kelompok atau organisasi sosial yang tersedia dan dapat berjalan efektif sehingga dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, usaha, dan lingkungan. Dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Mokong, kelembagaannya ditunjang oleh Karang Taruna Ai Beta dengan struktur formal yang jelas melalui SK Kepala Desa, Tim Penggerak PKK Desa Mokong dengan struktur pengurus lengkap dan lebih dari 20 anggota dari berbagai institusi, BUMDes Sumber Rejeki dengan struktur organisasi yang jelas, serta lembaga lainnya seperti LPM, Pokdarwis, dan Remaja Masjid. Sinergi antar lembaga ini menciptakan ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, memastikan pelaksanaan program berjalan terkoordinasi

Faktor-Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Arsiyah (2009) dalam penelitiannya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi, hambatan internal (individu), hambatan eksternal (kultural) dan pelaksanaan program (fasilitator).

Pembahasan

Keberhasilan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, diantaranya adalah:

1. Faktor Internal (Individual)

Faktor internal biasanya berasal dari dalam diri masyarakat sendiri seperti keterbatasan pengetahuan, dan keterampilan, serta kurangnya motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program pemberdayaan. Faktor internal penghambat pemberdayaan di Desa Mokong terdapat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program pemberdayaan bersama, terbukti dari pencurian bibit tanaman B2SA dan hasil budidaya ikan lele, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan awal pada sebagian masyarakat yang belum memahami manfaat jangka panjang program, sehingga partisipasi masih pasif dan terbatas. Faktor geografis juga mempengaruhi, di mana masyarakat Dusun Pelita tidak terlibat langsung karena lokasi pelaksanaan kegiatan yang jauh dari tempat tinggal mereka.

2. Faktor Eksternal (Kultural)

Hambatan eksternal adalah faktor penghambat yang berasal dari luar komunitas, seperti kebijakan pemerintah, lingkungan sosial, atau sistem ekonomi yang lebih luas. Faktor eksternal dalam pemberdayaan di Desa Mokong penghambat pemberdayaan meliputi lemahnya pendampingan dan akses pemasaran lokal untuk produk madu Maong, kebijakan kelembagaan desa yang kaku sehingga keinginan masyarakat Dusun Pelita untuk membentuk Karang Taruna sendiri tidak dapat direalisasikan, keterbatasan aksesibilitas geografis dengan jarak yang jauh dan waktu pertemuan malam hari menyebabkan partisipasi rendah. Dusun Kalimango mengalami hambatan lebih serius dengan akses jalan yang sangat terbatas dan bergantung pada jalur sungai, menciptakan disparitas pemberdayaan antar dusun.

3. Faktor Pelaksanaan Program (Fasilitator)

Faktor penghambat tidak hanya berasal dari masyarakat itu sendiri, ataupun dari dukungan luar komunitas dalam mempengaruhi pemberdayaan masyarakat tetapi ada dari pelaksanaan programnya atau fasilitator yang berperan dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Faktor pelaksanaan program penghambat pemberdayaan meliputi keterbatasan infrastruktur jalan menuju Dusun Kalimango yang masih mengandalkan jalur sungai tanpa jembatan, keterbatasan anggaran dan fasilitas operasional BUMDes yang tidak memiliki gedung operasional sendiri, keterbatasan modal usaha pada usaha penyewaan baju adat yang terbatas jumlahnya dan tidak dapat memenuhi permintaan tinggi, serta pendampingan program yang belum berkelanjutan, terutama dalam pengembangan strategi pemasaran dan inovasi produk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di Desa Mokong telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek pendukungnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di Desa Mokong dilaksanakan melalui empat aspek utama, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek bina manusia, Program B2SA yang dikelola oleh Tim Penggerak PKK Desa Mokong berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan penanaman bibit pangan lokal, serta Bimbingan Teknis pengolahan pangan lokal. Program ini mendorong kemandirian, kreativitas, kesadaran pola konsumsi sehat, dan ketahanan pangan masyarakat.
2. Aspek bina usaha, berbagai kegiatan ekonomi produktif seperti Rumah Pangan B2SA, produk Maong (Madu Olat Mokong), usaha penyewaan baju adat, serta BUMDes Sumber Rejeki mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi desa.
3. Aspek bina lingkungan, masyarakat memanfaatkan lahan desa untuk Rumah Pangan B2SA, rumput liar sebagai pakan ternak, pengembangan peternakan sapi dan ayam kampung, serta pelestarian budaya lokal melalui penyewaan baju adat, sehingga tercipta lingkungan sosial dan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
4. Aspek bina kelembagaan ditunjang oleh peran aktif Karang Taruna Ai Beta, PKK, BUMDes, LPM, Pokdarwis, dan Remaja Masjid yang saling bersinergi sehingga program pemberdayaan berjalan terkoordinasi dan berkelanjutan.

Namun demikian, pelaksanaan pemberdayaan berbasis kearifan lokal di Desa Mokong masih menghadapi beberapa hambatan, baik faktor internal berupa rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi, dan keterbatasan pengetahuan; faktor eksternal seperti lemahnya pemasaran, kebijakan kelembagaan yang kaku, serta sulitnya akses geografis; maupun faktor pelaksanaan program berupa keterbatasan infrastruktur, modal usaha, fasilitas operasional, dan pendampingan yang belum berkelanjutan.

SARAN

Pemerintah desa perlu memprioritaskan perbaikan infrastruktur akses ke daerah tertinggal, meningkatkan pendanaan berkelanjutan untuk program pemberdayaan, dan merevisi kebijakan kelembagaan agar lebih fleksibel. Organisasi lokal harus meningkatkan inovasi produk, strategi pemasaran digital, dan pendampingan berkelanjutan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam setiap program pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Agung, N. P., Wibowo, A., & Widiyanto. (2024). Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Desa Kaliboto oleh Kaliboto Green Institute Melalui Program Integrated Farming System dalam Pencapaian SDG's. *Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies: Conference Series*, 2(1), 28-39.
- Arsiyah, Ribawanto, H., & Sumartono. (2009). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *WACANA: Journal of Social and Humanity Studies*, 12(2), 370-375.
- Chozin, A. (2019). *Pembangunan Pedesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: IPM Press.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Hermanto, K., Mashabai, I., Hudaningsih, N., Utami, S. F., & Turrahmi, U. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Desa Maman Melalui Pelatihan Pembuatan Dimsum Siomay Bagi Kelompok PKK. *Jurnal Abdi Insani*, 12(9), 4647-4655.
- Husain, W. (2020). Pengaruh Penyusunan Rencana Pembangunan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Partisipasi Masyarakat Desa Sebagai Moderating Variabel Pada Beberapa Desa di Kabupaten Gorontalo. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 18-34.
- Mardikanto, T. (2003). *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pembangunan, dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Mardikonto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72-88.

- Maryani, (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustangin, Kusniawati, D., Islami, N. P., Setyaningrum, B., & Prasetyawati, E. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2(1), 59-72.
- Pitasari, Saraka, Winarti, H. T., & Mustangin. (2023). Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal: Analisis Program Desa Sentra Batik Bangun Mulya. *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(2), 149-160.
- Prameswari, A., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 168-179.
- Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). Asset Based Community Development Dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 115-126.
- Subagyo, P. J. (2011). *Metodologi Penelitian: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widianti, E., & Dzarkasyi, O. (2024). Dampak Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Melalui Dana Desa terhadap Masyarakat: Studi Kualitatif Deskriptif. *Forum Manajemen*, 22(1), 69-86.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.